

Available online at: prosiding.relawanjurnal.id/index.php/comdev
Proceeding of Community Development
Volume 2 (2018): 332-343; DOI: https://doi.org/10.30874/comdev.2018.347
"Memperkuat Produktivitas untuk Ketahanan Ekonomi Nasional"

TIPE ARTIKEL: ARTIKEL PENELITIAN

Participatory Governance in Development Planning Arrangement in Lubuk Sakat Village, Perhentian Raja District, Kampar Regency [*Participatory Governance* dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar]

Auradian Marta[1], Leo Agustino[2]
[1]Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia,
[2]Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia
E-mail:auradianunri@gmail.com; leoagustino@gmail.com

Abstract

One of the progress of the village is determined by the quality of its development planning. Development planning so far still leads to the practice of state-centered approaches. The community is "forced" to accept the results of development that have been carried out by the village government. Community participation and village institutions are often forgotten in the development planning process. This study tries to discuss and explain how the participatory governance model in making the Medium Term Development Plan (RPJM) Lubuk Sakat Village, Perhentian Raja District, Kampar Regency? This study uses a qualitative approach and collects data through interviews and document studies. The results of the study showed that the participatory governance model greatly assisted the village government in preparing the RPJMDes because it could allocate all resources from stakeholders to create village development planning policies. Furthermore, collaborative and participatory governance models can be used in the mechanism or stages of the village situation analysis (desk study) and SWOT analysis, identification of future needs, detecting needs and making strategies and action plans in overcoming problems in Lubuk Sakat village.

Keywords: Collaborative; Participatory Governance; development planning; Lubuk Sakat village

Abstrak

Salah satu kemajuan desa saat ini ditentukan oleh kualitas dari perencanaan pembangunannya. Perencanaan pembangunan selama ini masih mengarah pada praktek state-centered approach. Masyarakat "dipaksa" untuk menerima hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Partisipasi masyarakat dan kelembagaan desa sering kali dilupakan dalam proses perencanaan pembangunan. Penelitian ini mencoba untuk mendiskusikan dan menjelaskan bagaimanakah model participatory governance dalam pembuatan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengumpulkan data melalui wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model participatory governance sangat membantu pemerintah desa dalam menyusun dokumen RPJMDes karena dapat mengalokasikan seluruh sumber daya dari seluruh stakeholders untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan desa. Selanjutnya, model collaborative dan participatory governance dapat digunakan dalam mekanisme atau tahapan analisis situasi desa (desk study) dan analisis SWOT, identifikasi kebutuhan desa di masa akan datang, mendeteksi kebutuhan dan membuat strategi dan rencana aksi dalam mengatasi permasalahan di desa Lubuk Sakat.

Kata Kunci: *Collaborative; Participatory Governance;* Perencanaan Pembangunan; Desa Lubuk Sakat

Copyright © 2018, Auradian Marta; Leo Agustino
ISSN 2615-2924 (online)

PENDAHULUAN

Fenemena empirik perencanaan pembangunan selama ini masih didominasi oleh pemerintah atau state-centred approach. Pemerintah desa merupakan salah satu bagian dari pemerintahan nasional yang dibekali kewenangan yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu melaksanakan pembangunan desa. Secara teknis, pelaksanaan pembangunan desa diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang mana didalamnya terdapat tahapan perencanaan pembangunan desa. Dokumen perencanaan pembangunan desa yang dimaksud ketetntuan tersebut adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

Berdasarkan, kewenangan tersebut maka Pemerintah Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja mencoba untuk membuat dokumen perencanaan pembangunan desa. Desa Lubuk Sakat merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Perhentian Raja, yang terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu Dusun I Harapan Makmur (terdiri atas 4 RT, dan 2 RW), Dusun II Sinar Harapan (terdiri atas 4 RT dan 2 RW), dan Dusun III Harapan Jaya (terdiri dari 4 RT dan 2 RW). Desa Lubuk Sakat merupakan hasil pemerakaran dari Desa Kampung Pinang. Desa ini di mekarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Kampar pada tanggal 4 Oktober 2007 dan disahkan pada tanggal 5 Januari 2008.

Meskipun, Desa Lubuk Sakat terletak tidak jauh dari pusat ibu kota Kecamatan Perhentian Raja tidak menjamin dokumen perencanaan pembangunan desanya dapat dibuat sesuai dengan ketentuan dan harapan dari masyarakat serta stakeholders. Dokumen perencanaan pembangunan desa belum disusun berdasarkan aspirasi dan mekanisme kelembagaan masyarakat yang ada di desa. Artinya dalam hal ini keputusan kebijakan pembangunan desa dilakukan secara top down oleh Kepala Desa dan aparatur pemerintah desa. Hal ini dapat disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman baik Pemerintahan Desa, kelembagaan desa, maupun masyarakat desa tentang arti penting Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa tidak hanya sekedar dilegalisasi dengan Peraturan Desa, tetapi lebih dari itu secara substansi harus mampu menjawab tantangan permasalahan yang ada di desa seperti kemiskinan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat desa, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi empirik di Desa Lubuk Sakat terkait masalah pendidikan adalah jumlah anaka putus sekolah yang relatif tinggi yaitu 124 orang dan buta huruf sejumlah 5 orang.

Namun, di samping permasalahan sosial yang dihadapi oleh pemerintah desa Lubuk Sakat, terdapat kekuatan Desa Lubuk Sakat yakni memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah yaitu perkebunan kelapa sawit dengan terdapat perusahaan yang melakukan kegiatan produksi di wilayah tersebut. Namun, potensi yang dimiliki oleh desa Lubuk Sakat belum mampu dioptimalkan dalam pembuatan dokumen perencanaan pembangunan. Menjawab persoalan perencanaan pembangunan desa tersebut, maka dapat dikembangkan model participatory governance. Model ini telah berhasil digunakan pada pembangunan di Porto Alegre, Brazil (Abers, 2001; Baiocchi, 2001; Baiocchi, 2003; Koonings, 2004) dan Kerala, India (Arun, Arun, & Devi, 2011; Isaac & Heller, 2003; Williams, et al, 2011).

Menurut Gbikpi & Grote (2002:25) participatory governance adalah "a matter of ensuring that relevant actors participate in all the various governance arrangement, their quality must depend on their representativeness, as well as upon the decision-making procedures chosen by them to perform the arrangement". Artinya, dalam pembuatan keputusan atau kebijakan mensyaratkan adanya partisipasi dari aktor yang kompeten, mengetahui persoalan dan kebutuhan dari sasaran kebijakan tersebut.

Copyright © 2018, Auradian Marta; Leo Agustino

ISSN 2615-2924 (online)

Selanjutnya, Schmitter (2002:52-53) dalam participatory governance terdapat tiga gagasan penting yaitu (1) inovasi; (2) sustainability; dan (3) partisipasi. Lebih lanjut dikemukakan bahwa partisipasi "holders" dalam participatory governance sangat dibutuhkan. "Holders" yang dimaksud oleh Schmitter (2002:62-63) adalah right holders, spatial holders, shareholders, stakeholders, interest holders, knowledge holders, dan status holders. Sumber daya dari berbagai kelompok atau komunitas inilah yang pada akhirnya menentukan kualitas dari partisipasi dan keputusan yang dihasilkan.

Selanjutnya, model partisipasi ini dikembangkan oleh Sisto, Lopolito, & Vliet (2018) dalam perencanaan pembangunan dengan secara teknis dijelaskan peranan atau partisipasi stakeholders dalam perencanaan pembangunan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menganalisis konteks lokal dan membuat matriks analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities*, dan *Threats* (SWOT);
2. Mengidentifikasi kebutuhan di masa yang akan datang dengan pendekatan partisipasi;
3. Mendeteksi kebutuhan dan membuat aksi strategi utama dengan pendekatan partisipasi;
4. Membuat outline strategi dan validasi oleh *stakeholders*.

Kekuatan dari model yang dikembangkan oleh Sisto, Lopolito, & Vliet (2018) adalah metode ini merupakan gabungan pendekatan partisipasi dan integrasi dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena adanya penggabungan pendekatan tersebut, maka hasil dari perencanaan pembangunan memenuhi prinsip sustainability dan mendapatkan legitimasi dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan. Sustainablity dan legitimasi ini diperlukan agar perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik yang didukung penuh implementasinya oleh semua pihak dengan penuh tanggung jawab.

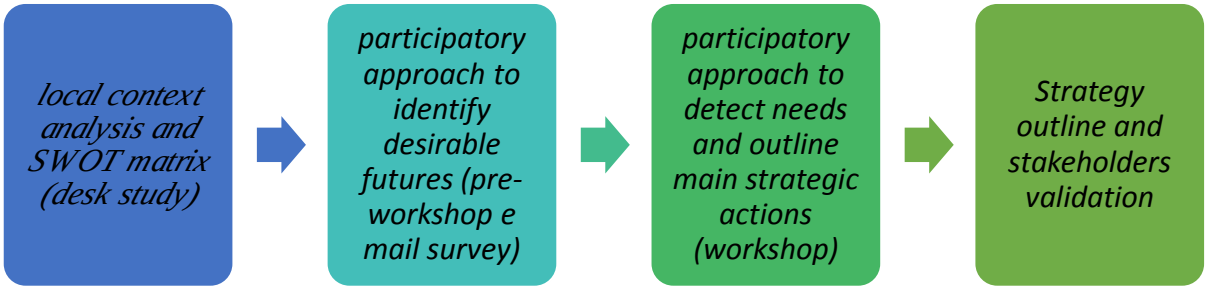
Selanjutnya, berdasarkan fenomena empirik yang terjadi di Desa Lubuk Sakat, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yaitu bagaimanakah model *participatory governance* dalam pembuatan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar? Pentingnya penelitian ini dilakukan karena menjadi pembelajaran bagi pemerintahan desa untuk dapat menggunakan sumber daya (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang ada di sekitarnya untuk dapat dioptimalkan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa. Sehingga, perencanaan pembangunan dapat menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat desa, pemerintahan desa, pemerintahan daerah, dan pemerintahan nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Bogdan, Taylor, & DeVault (2016) merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk mencari makna dari tindakan seseorang dan mempelajari setting dari proses sosial yang terjadi. Penelitian ini dilakukan di Desa Lubuk Sakat, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Riau. Penelitian ini dilakukan untuk mendiskusian dan menjawab pertanyaan bagaimana model *participatory governance* dalam pembuatan dokumen RPJM Desa Lucuk Sakat, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara terhadap Kepala Desa, aparatur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPDes), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kelembagaan desa lainnya seperti karang taruna dan ibu PKK. Sementara itu, untuk mendukung data dari hasil wawancara, digunakan juga studi dokumen dengan mengumpulkan data seperti profil desa, dokumen peraturan desa, dan dokumen potensi desa, sumber data dari mass media, serta data yang bersumber dari jurnal ilmiah.

Copyright © 2018, Auradian Marta; Leo Agustino
ISSN 2615-2924 (online)

Setelah data dikumpulkan, maka data dianalisis secara kualitatif (Creswell, 2014:97) yang mana prosesnya dimulai dari pengumpulan data dan dikategorisasi sesuai atau relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis data berdasarkan tuntunan dari model *participatory governance* dan selanjutnya adalah menginterpretasikan analisis tersebut serta membuat kesimpulan. Model *participatory governance* yang digunakan sebagai tuntuan sebagai analisis adalah sesuai dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:



Gambar 1: Tahapan partisipasi dalam perencanaan pembangunan pedesaan
Sumber: didaopsi dari Sisto, Lopolito, & Vliet (2018:445)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dokumen perencanaan pembangunan merupakan syarat terpenting agar pembangunan dapat dilakukan secara sistematis, efektif, dan efisien. Mekanisme perencanaan pembangunan desa di Indonesia sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang mana mempunyai spirit *participatory governance* dengan mengharuskan perencanaan pembangunan berdasarkan hasil musyawarah yang dikenal dengan isitilah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Pemerintah Desa Lubuk Sakat yang mempunyai kewenangan dalam perencanaan pembangunan desa dan membuat dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa.

Pemerintahan desa yakni Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lubuk Sakat telah berhasil membuat dokumen RPJMDes untuk periode 2015-2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (PJMD) Desa Lubuk Sakat ini tertuang dalam Peraturan Desa Lubuk Sakat Nomor 1 Tahun 2015. Penyusunan dokumen RPJMDes ini dapat dianalisis dengan model *participatory governance* yang dikembangkan oleh Sisto, Lopolito, Vliet (2018) sebagai berikut:

1. Menganalisis konteks lokal dan membuat analisis SWOT

Analisis terhadap situasi di desa dibutuhkan untuk mengenali akar permasalahan yang terjadi sehingga dapat dicarikan solusi pemecahan masalah. Tidak hanya menganalisis konteks sosial, politik, budaya, sejarah yang ada di desa, akan tetapi juga memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan desa dan masyarakat desa atau dikenal dengan analisis SWOT. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh desa adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Identifikasi masalah di Desa Lubuk Sakat

Copyright © 2018, Auradian Marta; Leo Agustino

ISSN 2615-2924 (online)

No	Masalah	No	Masalah
1	MCK masyarakat masih belum berfungsi dengan baik	31	Pelatihan pertanian, perikanan, dan peternakan masih kurang
2	Pembangunan MCK umum di setiap dusun dan sekolah masih kurang	32	Arena futsall dan bulutangkis in door belum ada
3	Jalan desa tergenang air karena pembangunan gorong-gorong dan tanggul; air belum ada	33	Sarana dan prasarana olahraga belum ada, dan yang sudah ada perlu perbaikan
4	Kebersihan, keindahan, dan pelestarian lingkungan belum tercipta dengan baik	34	Belum ada tempat penyimpanan perlengkapan makam dan pagar makam belum ada
5	Pembangunan gedung Posyandu di dusun II dan rehab gedung Posyandu di Dusun Sinar Harapan	35	Semua dusun membutuhkan sound system
6	Semenisasi jalan lingkungan masih kurang	36	Pelayanan kesehatan masih kurang
7	Semenisasi jalan kebun dan pembuatan jalan produksi belum ada	37	GOR, stadion mini, tribun dan pagar lapangan bola kaki belum ada
8	Drainase lingkungan masih kurang	38	Pembangunan taman dilingkungan sekolah
9	Pasar desa belum ada	39	Mobil ambulance desa belum ada
10	Boxculvet di semua dusun masih kurang	40	Gapura selamat datang perlu diperbaiki
11	Pengerasan jalan yang menghubungkan 2 dusun belum ada	41	Sekolah Dasar belum mempunyai aula
12	Pengaspalan jalan fasilitas umum belum ada	42	Bantuan moubiler untuk SD
13	Jembatan cor di dusun III belum ada	43	Pustu belum Ada
14	Turap di 3 dusun belum ada	44	Komputer di sekolah masih kurang
15	Pos Siskamling dan portal belum ada	45	Perbaikan gedung PDTA/MDA
16	Pavling block halaman kantor belum ada	46	Bantuan moubiler PDTA/MDA
17	Gudang dan dapur kantor belum ada	47	Penambahan lokal untuk SD
18	Keramik teralis balai pertemuan belum ada	48	Pembangunan gedung pustaka untuk SD
19	Pagar lingkungan fasilitas umum kurang layak	49	Pada musim hujan banyak masyarakat terserang penyakit
20	Drainase besar di jalan utama belum ada	50	Kepala Desa dan perangkat desa belum mendapat Tunjangan yang memadai
21	Kantor BPD, LPM dan Karang Taruna belum ada	51	Biaya operasional Pemerintahan Desa masih rendah
22	Parkir kantor desa belum ada	52	Anggota BPD belum ada tunjangan operasional BPD
23	Balai pertemuan dusun blm ada	53	Insentif RT dan RW belum memadai
24	Tempat usaha PKK dan kantor koperasi belum ada	54	Aparatur desa belum dapat menyusun Peraturan Desa
25	Ekonomi produktif belum berkembang	55	Aparatur desa belum mampu menyusun produk hukum, RPJMDes, RKP, APBDes, keuangan desa dan administrasi

Copyright © 2018, Auradian Marta; Leo Agustino
ISSN 2615-2924 (online)

26	Pagar kantor desa dan balai pertemuan belum ada	56	Aparatur desa belum mampu membuat proposal kegiatan desa
27	Masih banyak rumah yang belum layak huni	57	Pendataan penduduk belum semuanya tercover
28	Pembangunan masjid belum selesai pengerjaannya	58	Anak Balita belum semua mendapatkan pendidikan PAUD dan TK
29	Turap Sungai Kulim belum ada	59	Pada musim kemarau kekurangan air bersih
30	Mushallah di dusun III sudah perlu direhab	60	Belum tersedianya sarana prasarana pertanian yang merupakan kebutuhan primer pangan untuk meningkatkan PAD Desa
		61	Perlengkapan anak sekolah SD dan seragamnya sudah tidak layak pakai
		62	Organisasi masyarakat kurang pembinaan

Sumber: Pemerintah Desa, 2016

Pemerintahan Desa Lubuk Sakat, kelembagaan yang ada di Desa, beserta masyarakat desa telah membuat potensi masalah yang ada di desa. Namun, mereka belum membuat analisis SWOT sebagai instrumen dalam membantu memecahkan persoalan yang dihadapi. Identikasi terhadap peluang dan tantangan diperlukan untuk memutuskan strategi yang akan dirumuskan dalam dokumen perencanaan pembangunan. Secara sederhana, pemetaaan faktor internal yang menggambarkan kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal yang menggambarkan peluang dan ancaman dapat diuraikan sebagai berikut:

2. Faktor internal (kekuatan dan kelemahan desa Lubuk Sakat)

Desa Lubuk Sakat mempunyai kekuatan yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan desa adalah sebagai berikut:

a. Ketersediaan lahan kosong di desa;
b. Sumber daya alam seperti perkebunan karet dan kelapa sawit;
c. Sosial budaya masyarakat dengan semangat swadaya dan gotong royong;
d. Letak strategis yang tidak terlalu jauh dengan ibu kota Provinsi Riau;
e. Telah terbentuknya kelompok tani dan gabungan kelompok tani serta usaha simpan pinjam;
f. Sektor peternakan yang berkembang; dan
g. Adat istiadat dan lembaga adat yang masih terpelihara.
h. Sementara itu, yang menjadi sisi negatif atau kelemahan yang dimiliki oleh Desa Lubuk Sakat adalah sebagai berikut:
i. Sumber daya aparatur desa dan SDM masyarakat desa yang masih rendah;
j. Pendapatan Asli Desa (PADes) rendah;
k. Sarana dan prasaranan pendidikan, kesehatan, dan penunjang kegiatan kemasyarakatan yang masih kurang; dan
l. Kualitas dan kuantitas hasil perkebunan yang masih kurang.

3. Faktor eksternal (peluang dan ancaman desa Lubuk Sakat)

Selain daripada identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan yang ada di desa Lubuk Sakat, berikut ini peluang dan tantangan yang dihadapi oleh desa sebagai faktor eksternal yang dapat

Copyright © 2018, Auradian Marta; Leo Agustino

ISSN 2615-2924 (online)

mempengaruhi perencanaan pembangunan desa. Adapun peluang yang dimiliki oleh desa Lubuk Sakat adalah sebagai berikut:

1. Permintaan terhadap hasil perkebunan karet dan kelapa sawit yang tinggi;
2. Terdapat perusahaan perkebunan yang melakukan kegiatan di wilayah desa Lubuk Sakat;
3. NGOs yang aktif dalam pendampingan masyarakat desa;
4. Dukungan annggaran dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah cukup besar (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD)).

Sementara itu, beberapa peluang di atas dapat juga menjadi ancaman bagi desa Lubuk Sakat apabila tidak dapat disikapi oleh Pemerintahan Desa dan masyarakat desa dengan baik. Identifikasi ancaman yang dapat menghambat pembangunan desa adalah sebagai berikut:

a. Tidak stabilnya harga komoditas kelapa sawit dan karet;
b. Konversi lahan yang diakibatkan tingginya permintaan hasil kelapa sawit dan karet;
c. Perambahan hutan di wilayah desa Lubuk Sakat;
d. Ancaman konflik dengan perusahaan perkebunan terhadap pemanfaatan lahan; dan
e. Keterlambatan dalam pencairan anggaran desa dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan tantangan) yang dimiliki oleh Desa Lubuk Sakat, maka dapat dirumuskan strategi dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi perkebunan kelapa sawit dan karet dengan cara ekstesifikasi;
2. Pelibatan perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam pendanaan program dan kegiatan desa;
3. Mengintegrasikan kelapa sawit dengan sapi ternak;
4. Mengembangkan sarana dan prasarana desa baik melalaui swadaya maupun pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Kampar;
5. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa;
6. Pengembangan ekowisata dengan hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai objek ekowisata; dan
7. Pemanfaatan usaha simpan pinjam untuk mendukung usaha ekonomi kreatif di desa.

Berkaitan dengan strategi tersebut, Pemerintah Desa Lubuk Sakat dapat mencari contoh pembelajaran yang sukses. Integrasi perkebunan kelapa sawit dengan ternak sapi dapat menjadi program unggulan yang dikembangkan oleh Pemerintah Desa Lubuk Sakat. Hubungan yang saling menguntungkan antara perkebunan kelapa sawit dan ternak sapi dapat mendukung perekonomian masyarakat. Kotoran sapi dapat dijadikan pupuk organik yang dibutuhkan kelapa sawit, dan selanjutnya, ternak sapi juga dapat mencari makan di sekitar perkebunan kelapa sawit karena ketersediaan pakan ternak yang memadai. Integrasi perkebunan kelapa sawit ini telah diuji dan sukses diimplementasikan petani di Indonesia (lihat penelitian Daru, Yulianti, & Widodo, 2014; dan Siswati & Rizal, 2017).

1. Mengidentifikasi kebutuhan di masa yang akan datang dengan pendekatan partisipasi

Kegiatan pra workhsop perlu dilakukan dalam mengumpulan aspirasi dari seluruh stakeholders guna mengidentifikasi kebutuhan desa di masa yang akan datang. Namun, secara empirik identifikasi kebutuhan ini dilakukan secara top down oleh pemerintah desa belum melibatkan kelembagaan desa secara menyeluruh seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa

Copyright © 2018, Auradian Marta; Leo Agustino
ISSN 2615-2924 (online)

(BPD). Selain dari pada itu, pemanfaatan potensi desa oleh Pemerintah Desa juga tidak dilakukan dengan melibatkan stakeholders seperti perusahaan perkebunan dalam rapat perencanaan pembangunan.

Selain daripada itu mewujudkan sustainability dalam perencanaan pembangunan, maka identifikasi kebutuhan juga dilakukan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, Pemerintah Daerah Provinsi Riau, serta melibatkan anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan Lubuk Sakat. Hal ini agar dimaksudkan untuk sinkronisasi dan harmonisasi program antar-pemerintahan sehingga dapat saling mendukung untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dan nasional. Menurut Qin (2015) yang mengkaji sustainability pembangunan pedesaan di Cina terdapat 3 aspek dari sustainable development yaitu; (1) *economy*; (2) *ecology*; dan (3) society. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dianalisis ketiga aspek tersebut, karena ketiga aspek tersebut memiliki hubungan yang terintegrasi satu sama lain.

Sementara itu, berkaitan dengan konteks sosial ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat desa Lubuk Sakat seperti konflik dengan perusahaan perkebunan serta dampak kerusakan lingkungan yang diterima, maka perlu dilibatkan civil society seperti Jikalahari dan scale-up untuk mengidentifikasi hal tersebut. Penelitian Irma, Gunawan, & Suratman (2017) menunjukkan bahwa ekosistem gambut dan Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Desa Lubuk Sakat sudah mulai terancam akibat konversi lahan gambut pada lahan perkebunan yang menyebabkan tutupan lahan menjadi berkurang. Tantangan konflik perkebunan akan dapat dihindari jika benih-benih konflik dapat dicegah. Berikut ini secara garis besar inventarisasi kebutuhan masyarakat desa berdasarkan analisis terhadap permasalahan di desa. Begitu juga wilayah kawasan hutan di Desa Lubuk Sakat sebagian telah dialihkan menjadi Area Pemanfaatan Lain (APL), padahal di daerah tersebut ditemukan perkebunan kelapa sawit yang telah lama beroperasi (Eyes on the Forest, 2016).

Tabel 2
Identifikasi Kebutuhan Desa Lubuk Sakat

No	Aspek *sustainability* pembangunan	Identifikasi Kebutuhan
1	Economy	1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat 2) Pembukaan lapangan pekerjaan 3) Pelatihan keterampilan kerja 4) Pemenuhan fasilitas pendukung perekonomian masyarakat seperti alat pendukung perkebunan dan peternakan
2	Ecology	1) Membuat sanitasi dan drainase lingkungan desa 2) Naturalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) 3) Pemeliharaan hutan dan ekosistemnya 4) Menjaga ekosistem lahan gambut dan areal perkebunan
3	Society	1) Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa 2) Pembangunan sarana dan prasarana kemasyarakatan

Copyright © 2018, Auradian Marta; Leo Agustino

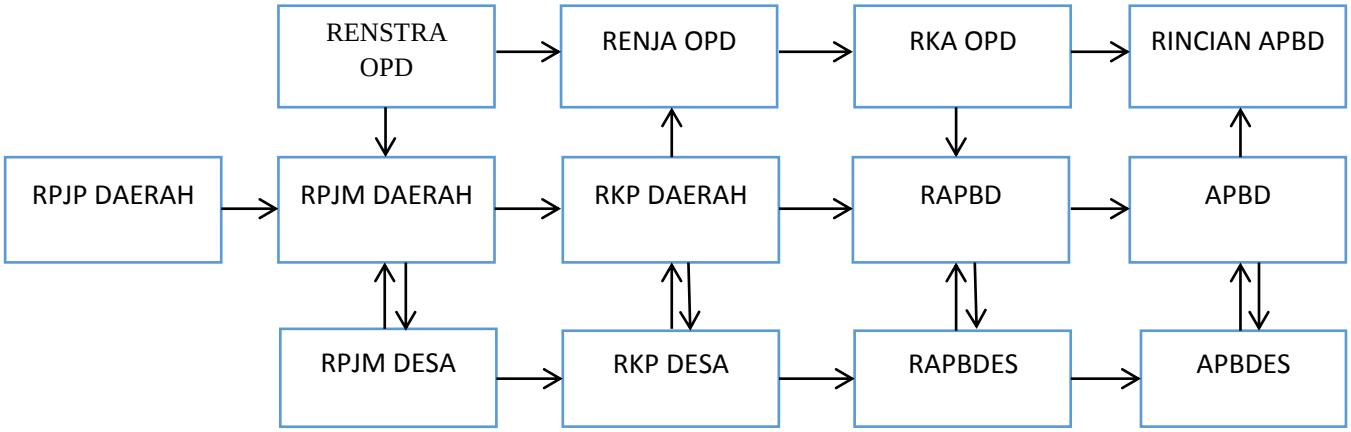
ISSN 2615-2924 (online)

	3) Pembinaan lembaga adat dan kemasyarakatan

2. Mendeteksi kebutuhan utama dan membuat aksi strategi utama dengan pendekatan partisipasi

Setelah mengidentifikasi kebutuhan desa di masa yang akan datang, partisipasi dari elemen *governance* (pemerintah, *civil society*, dan *private sector*) akan dibutuhkan dalam menyusun langkah aksi sebagai strategi konkret penyelesaian masalah. Mendeteksi kebutuhan utama atau prioritas dilakukan dengan sistem peringkat melalui forum musrenbangdes. Sistem peringkat ini akan memudahkan dalam menyusun program dan kegiatan pemerintah desa setiap tahunnya.

Pemerintah desa tidak hanya membuat program dan kegiatan untuk desa semata, akan tetapi diperlukan penyelarasan rencana aksi dengan berbagai pihak terutama Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Provinsi Riau. Program dan kegiatan yang akan disusun ini nantinya akan diuraikan dalam jangka waktu 1 tahun dan dibuatkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Berikut diagram penyelerasan RPJM Desa dengan RPJMD Daerah dan rencana aksi yang akan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa:



Gambar 1. Alur Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Daerah serta Penganggaran Rencana Aksi
Sumber: diolah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan Permendagari Nomor 114 Tahun 2014

Berdasarkan alur di atas jelas bahwa terdapat keterkaitan antara perencanaan pembangunan desa dan daerah serta penganggaran program dan kegiatan desa dan daerah. Artinya disini adalah harus ada *link and match* antara pemerintah desa dan Pemerintahan Daerah (eksekutif dan legislatif) dalam perencanaan pembangunan dalam forum-forum musyawarah desa, musyawarah perencanaan pembangunan desa, maupun musrenbang kabupaten.

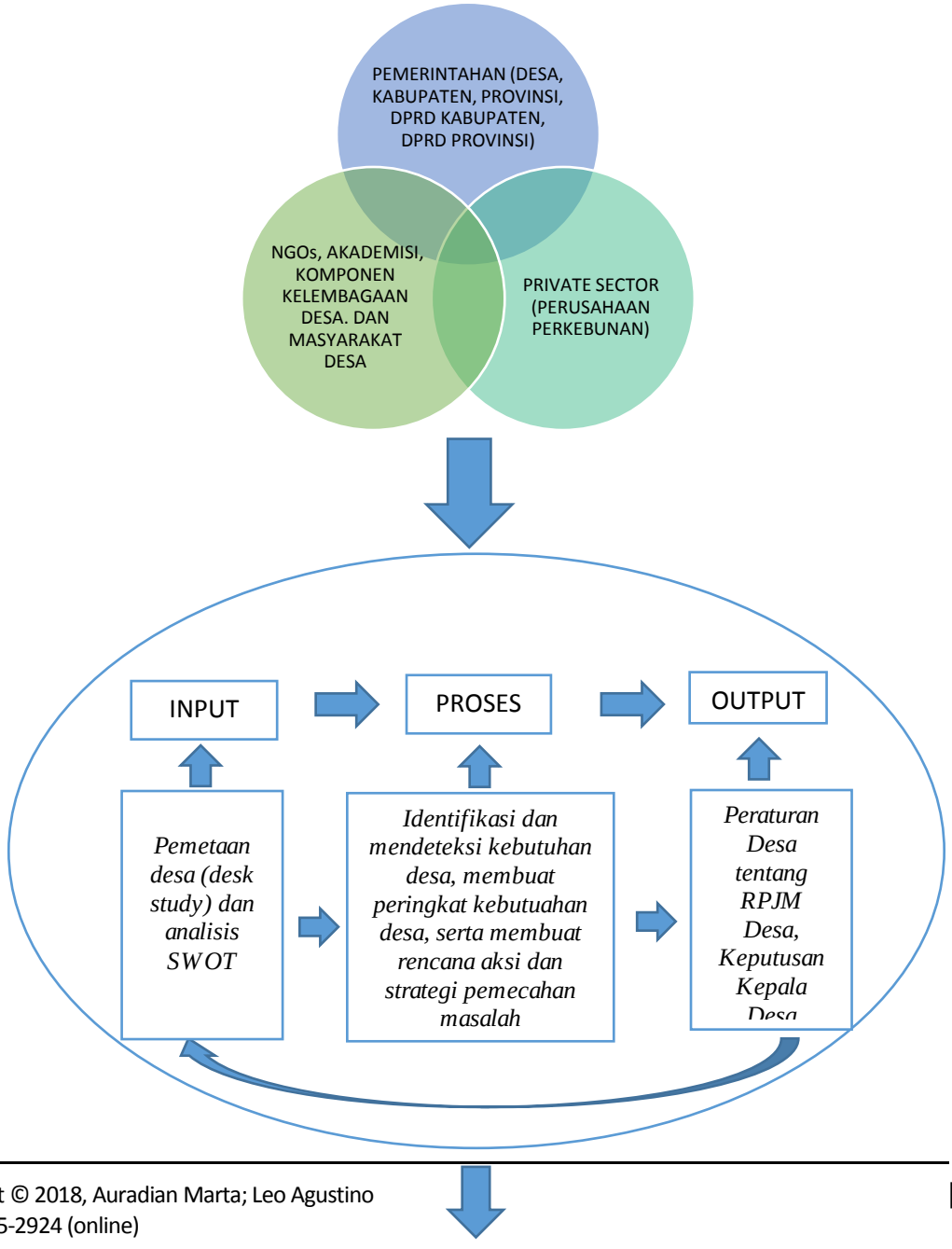
Tidak hanya itu, rencana aksi yang tertuang dalam program dan kegiatan desa dapat bersumber dari pihak ketiga. Perusahaan perkebunan yang ada di desa dapat dimanfaatkan untuk itu dengan program *Corporate Sosial Responsibility*. Namun program CSR ini harus disesuaikan dengan kebutuhan desa sehingga hasil yang diperoleh dapat efektif dalam menanggulangi permasalahan desa.

Copyright © 2018, Auradian Marta; Leo Agustino
ISSN 2615-2924 (online)

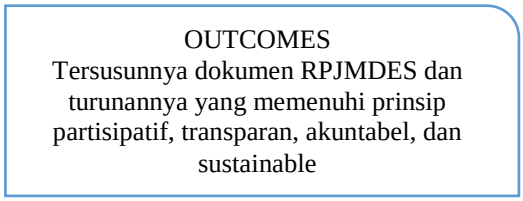
3. Outline strategi dan validasi oleh *stakeholders*

Terakhir, adalah proses decision making dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu menuangkan draft program dan kegiatan atau rencana aksi yang telah disusun bersama ke dalam Peraturan Desa. Transparansi dan keterbukaan akses akan sangat dibutuhkan agar pelibatan stakeholders dapat optimal dalam proses penyusunan RPJMDes. Langkah aksi yang telah dibuat akan dilakukan verifikasi kembali dan validasi dari seluruh stakeholders sehingga dapat membangun konsensus dan komitmen bersama untuk pencapaian tujuan pemerintahan desa Lubuk Sakat.

Untuk lebih sederhana model participatory governance di Desa Lubuk Sakat dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Copyright © 2018, Auradian Marta; Leo Agustino
ISSN 2615-2924 (online)



Gambar 3. Model *Collaborative* dan *Participatory Governance* dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa model *participatory governance* sangat membantu dalam menyatukan seluruh sumber daya yang ada dalam proses penyusunan dan pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Lubuk Sakat. Langkah-langkah dalam perencanaan pembangunan yaitu analisis konteks (desk study) dan analisis SWOT, identifikasi kebutuhan di masa yang akan datang, mendeteksi kebutuhan dan rencana aksi, serta validasi rencana aksi dan strategi pencapaian tujuan dilakukan dengan model *collaborative* dan *participatory governance*.

Kekuatan dari model *collaborative* dan *participatory governance* adanya kolaborasi antar-aktor (pemerintahan, *civil society*, dan *private sector*) dalam perencanaan pembangunan di desa. Setiap aktor mempunyai kedudukan yang sama dalam proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan forum musyawarah untuk mencapai konsensus. Dokumen RPJM Desa merupakan hasil kolaborasi aktor yang didalamnya ada integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi sehinga tercipta *equality* baik dalam proses maupun nantinya dalam menikmati hasil pembangunan. Keberhasilan dari pembangunan desa akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah dan nasional.

REFERENSI

Abers, R. (2001). Learning democratic practice: distributing government resources through popular participation in Porto Alegre, Brazil. *The challenge of urban government: Policies and practices*, 129-43.

Arun, S., Arun, T., & Devi, U. (2011). Transforming livelihoods and assets through participatory approaches: the Kudumbashree in Kerala, India. *International Journal of Public Administration*, *34*(3), 171-179.

Baiocchi, G. (2001). Participation, activism, and politics: the Porto Alegre experiment and deliberative democratic theory. *Politics & Society*, *29*(1), 43-72.

Baiocchi, G. (2003). Participation, Activism, and Politics: The Porto Alegre Experiment. Dalam Fung, A., & Wright, E.O.(Eds). *Institutional innovations in Empowered Participatory Governance. The Real Utopias* IV. London & New York: Berso, 45-76

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, California: Sage Publications.

Daru, T. P., Yulianti, A., & Widodo, E. (2014). Potensi hijauan di perkebunan kelapa sawit sebagai pakan sapi potong di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Pastura*, *3*(2), 94-98.

Copyright © 2018, Auradian Marta; Leo Agustino
ISSN 2615-2924 (online)

Eyes on the Forest. (2016). "Legalisasi" Perusahaan Sawit melalui Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau Laporan Investigatif dan Analisis Penginderaan Jarak Jauh di 26 Perusahaan Perkebunan Sawit. Diperoleh dari http://www.eyesontheforest.or.id

Gbikpi, B., & Grote, J. R. (2002). From democratic government to participatory governance. Dalam Grote, J. R., & Gbikpi, B. (Eds). *Participatory Governance Political and Societal Implications. Leske & Budrich,* Opladen: Springer Fachmedien Wiesbaden, 17-34.

Irma, W., Gunawan, T., & Suratman, S. Pengaruh Konversi Lahan Gambut Terhadap Ketahanan Lingkungan di DAS Kampar Provinsi Riau Sumatera. *Jurnal Ketahanan Nasional*, *24*(2), 170-191.

Isaac, T. T., & Heller, P. (2003). Democracy and development: Decentralized planning in Kerala. *Deepening democracy.* Dalam Fung, A., & Wright, E.O.(Eds). *Institutional innovations in Empowered Participatory Governance. The Real Utopias* IV. London & New York: Berso Book, 77-110.

Koonings, K. (2004). Strengthening citizenship in Brazil's democracy: Local participatory governance in Porto Alegre. *Bulletin of Latin American Research*, *23*(1), 79-99.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Qin, B. (2015). Sustainable Development in Rural China Field Survey and Sino-Japan Comparative Analysis. London & New York: Springer

Schmitter, P. C. (2002). Participation in governance arrangements: is there any reason to expect it will achieve "sustainable and innovative policies in a multi-level context"?. Dalam Grote, J. R., & Gbikpi, B. (Eds). *Participatory Governance Political and Societal Implications. Leske & Budrich,* Opladen: Springer Fachmedien Wiesbaden, 51-69.

Sisto, R., Lopolito, A., & van Vliet, M. (2018). Stakeholder participation in planning rural development strategies: Using backcasting to support Local Action Groups in complying with CLLD requirements. *Land Use Policy*, *70*, 442-450.

Siswati, L., & Rizal, M. (2017). Peningkatan Pendapatan Petani Pertanian Terpadu Ternak Sapi Perah Dan Kelapa Sawit Di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Peternakan*, *20*(2), 51-58.

Taylor, S. J., Bogdan, R., & DeVault, M. (2015). *Introduction to qualitative research methods : A guidebook and resource 4th Edition*. New Jersey: John Wiley & Sons.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Williams, G., et al. (2011). Performing participatory citizenship–politics and power in Kerala's Kudumbashree programme. *Journal of Development Studies*, *47*(8), 1261-1280

Copyright © 2018, Auradian Marta; Leo Agustino

ISSN 2615-2924 (online)